BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam negara hukum Indonesia. Pemilu menjadi momen penting bagi warga negara untuk memilih wakil-wakil mereka dalam berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan anggota legislatif di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Indonesia telah menggelar berbagai jenis pemilu, termasuk pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, dan pemilihan kepala daerah, yang semuanya memiliki tingkat kompleksitas dan dampak yang signifikan bagi arah dan stabilitas negara.

Selama pelaksanaan pemilu, banyak dinamika sosial, politik, dan budaya yang muncul. Salah satu tantangan besar yang sering muncul dalam pemilu adalah munculnya ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat mengancam integritas pemilu dan stabilitas sosial. Ujaran kebencian ini seringkali dipicu oleh ketegangan politik, perbedaan ideologi, dan ketidaksetujuan dalam pilihan politik. Keberadaan ujaran kebencian yang tidak terkendali dapat merusak proses pemilu yang adil dan merugikan masyarakat yang rentan terhadap pengaruh negatifnya.¹

Terlebih lagi, fenomena ujaran kebencian semakin kompleks dalam era digital dan media sosial, di mana pesan-pesan negatif dapat dengan cepat menyebar

¹Abdullah, dan Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009), hlm. 72.

dan mempengaruhi opini publik dalam skala yang lebih luas. Dengan berbagai perubahan teknologi dan perilaku komunikasi, pemilu di Indonesia juga menghadapi tantangan baru dalam mengendalikan ujaran kebencian.

Howard dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Free Speech and Hate Speech* mengemukakan "*Hate speech is a term that does not merely refer to expressions of general hatred. It is a term used to refer specifically to expressions of hatred directed towards particular groups or individuals in specific contexts. This definition of hate speech often includes prohibitions against expressions that insult, maliciously malign, or degrade the dignity of groups or individuals, especially when based on factors such as skin color, race, ethnicity, or national origin.*"² yang dapat dipahami sebagai ekspresi kebencian tertentu yang ditujukan kepada kelompok atau individu tertentu dalam konteks tertentu. Ini sering melibatkan larangan terhadap ungkapan yang menghina, mencemarkan, atau merendahkan martabat individu atau kelompok, terutama jika didasarkan pada faktor seperti warna kulit, ras, etnis, atau asal nasional.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum. Sebelumnya, pengawas pemilu merupakan lembaga sementara (ad hoc) yaitu panitia pengawasan pemilu (Panwaslu).³ Kewenangan utama pengawas

²Jeffrey W. Howard, "Free Speech and Hate Speech," *Annual Review of Political Science* 22, no. 1 (May 11, 2019): 93–109, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051517-012343>.

³Dahlan Thaib, dan Ni'matul Huda (ed), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm 13.

pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahap pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.⁴

Dalam konteks pemilu di Indonesia, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) memiliki peran sentral dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk ujaran kebencian. Bawaslu berusaha untuk mencegah dan menanggulangi ujaran kebencian dalam rangka memastikan pemilu berlangsung secara damai, adil, dan demokratis.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Bawaslu bekerja dalam menghadapi ujaran kebencian, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mereka dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengendalian ujaran kebencian selama pemilu di Indonesia.

Adapun ayat yang berubungan mengenai ujaran kebencian terdapat di dalam Q.S Al-Hujurat/49: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.⁵

⁴<http://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawas-pemilu/> di akses tanggal 03-09-2023 waktu 15:25 WITA

⁵Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1984), Pelita III

Pemilu di Indonesia memerlukan pengawasan dan pemantauan yang ketat untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokratis tersebut. Dalam rangka menjaga pemilu yang bersih dan bebas dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk ujaran kebencian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral yang sangat penting. Bawaslu, sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum, memiliki sejumlah peran kunci dalam konteks pemilu di Indonesia:

1. Pengawasan dan Pengendalian Pemilu

Bawaslu bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan semua tahap pemilu, mulai dari tahap perencanaan, pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Mereka memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Penyelidikan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu, termasuk ujaran kebencian yang dapat memicu konflik dan kerusuhan selama pemilu. Mereka dapat menerima laporan, mengumpulkan bukti, dan mengambil tindakan yang sesuai terhadap pelanggaran tersebut.

3. Penyelesaian Sengketa

Bawaslu juga berperan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Mereka mendengarkan keluhan dari peserta pemilu dan pemilih, serta memutuskan sengketa-sengketa yang timbul selama proses pemilu.

4. Pendidikan Pemilih

Bawaslu aktif dalam memberikan edukasi kepada pemilih tentang hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Mereka berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang adil dan berintegritas.

5. Pengawasan Kampanye

Bawaslu memantau kampanye pemilu dan memastikan bahwa semua calon dan partai politik mematuhi peraturan yang mengatur kampanye, termasuk larangan ujaran kebencian dan praktik-praktik yang dapat merusak proses pemilu.

6. Rekomendasi dan Advokasi

Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk perbaikan sistem pemilu. Mereka dapat melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung pemilu yang lebih baik.

Dalam konteks penanggulangan ujaran kebencian, peran Bawaslu menjadi sangat krusial. Mereka harus dapat mengidentifikasi, mengawasi, dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan ujaran kebencian dengan cepat dan efektif.

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sering kali menjadi panggung bagi eskalasi ujaran kebencian yang dapat memecah-belah masyarakat dan mengancam stabilitas politik. Husni Mubarak, Dosen di Universitas Paramadina dalam wawancaranya mengatakan bahwa, ujaran kebencian yang muncul terjadi karena 2 faktor yaitu histori konflik dan memori kekerasan yang pernah terjadi di suatu wilayah serta tidak adanya upaya mediasi serta kontra narasi yang kuat saat provokasi ujaran kebencian terjadi. Penanganan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu secara moralitas, sanksi administratif hingga pidana

bagi pelaku ujaran kebencian berat seperti hasutan dan provokasi yang mengarah pada kekerasan dan pelanggaran HAM. Adanya penegakan hukum yang proporsional akan membuat para pelaku ujaran kebencian tidak lagi sewenang-wenang dalam melakukan hasutan dan provokasi.”⁶

Ujaran kebencian adalah pernyataan atau tindakan yang mengecam atau mendiskriminasi kelompok atau individu berdasarkan ras, agama, etnis, atau orientasi politik mereka. Fenomena ini cenderung meningkat selama masa kampanye pemilu dan pada periode seputar hari pemungutan suara. Ujaran kebencian yang marak muncul dimasyarakat terhadap capres dan cawapres sering kali terdengar, bahkan tidak sedikit orang yang mempercayai kabar atau berita tersebut. Beberapa gagasan penting terkait eskalasi ujaran kebencian selama pemilu di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Peran Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memberikan platform yang lebih besar bagi penyebaran ujaran kebencian selama pemilu. Pesan-pesan negatif dapat menyebar dengan cepat melalui platform media sosial, memicu ketegangan dan konflik diantara berbagai kelompok.

2. Politik Identitas

Salah satu pemicu utama eskalasi ujaran kebencian selama pemilu adalah politik identitas. Politikus dan partai politik sering memanfaatkan perbedaan identitas seperti etnis, agama, dan budaya untuk memperoleh dukungan atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih substansial.

⁶<https://kabar24.bisnis.com/read/20230304/15/1633990/ujaran-kebencian-bakal-masif-jelang-pemilu-2024-pakar-peringatkan-aparat-jangan-bikin-tambah-runyam>. diakses pada tanggal 14 November 2023 Pukul 19.00 wita.

3. Polarisasi Politik

Polarisasi politik yang semakin meningkat di Indonesia juga berkontribusi pada eskalasi ujaran kebencian. Masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang berlawanan, dan ujaran kebencian sering digunakan sebagai alat untuk menggambarkan kubu yang berlawanan sebagai musuh.

4. Ketidaksetaraan Akses Informasi

Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap informasi yang akurat dan seimbang selama pemilu. Hal ini dapat memicu eskalasi ujaran kebencian karena ketidaksetaraan dalam akses informasi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap berbagai kandidat dan partai politik.

5. Potensi Kerusuhan

Eskalasi ujaran kebencian selama pemilu dapat menciptakan ketegangan yang tinggi dan bahkan berpotensi memicu kerusuhan. Ini dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara.

Pemahaman yang lebih baik tentang upaya Bawaslu dalam menangani ujaran kebencian selama pemilu di Kabupaten Kotabaru menjadi esensial untuk memperkuat demokrasi dan stabilitas sosial dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Dalam konteks ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengendalikan dan menanggulangi eskalasi ujaran kebencian selama pemilu. Mereka perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk mencegah dan mengatasi ujaran kebencian. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji upaya Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menanggulangi ujaran kebencian pada

pelaksanaan pemilu sebagai langkah penting dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di tingkat daerah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Bawaslu bekerja dalam menghadapi ujaran kebencian, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mereka dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengendalian ujaran kebencian selama pemilu di Indonesia. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam tentang upaya Bawaslu dalam menghadapi eskalasi ujaran kebencian selama pemilu tahun 2024 dan bagaimana tindakan mereka memengaruhi dinamika pemilu serta stabilitas sosial di Kabupaten Kotabaru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menanggulangi ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang ujaran kebencian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam menanggulangi ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui mengenai pandangan Islam tentang ujaran kebencian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari judul "Upaya Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam Menanggulangi Ujaran Kebencian pada Pelaksanaan Pemilu" dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis:

1. Manfaat secara Akademik:

- a. Kontribusi terhadap Pengetahuan: Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik tentang pengawasan pemilu, penanggulangan ujaran kebencian, dan demokrasi lokal di Indonesia.
 - b. Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber data bagi penelitian akademik lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait.
 - c. Pembelajaran Metodologi: Menyediakan contoh studi kasus yang dapat digunakan untuk pembelajaran metodologi penelitian sosial dan politik.
2. Manfaat Praktis:
- a. Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi ujaran kebencian selama pemilu.
 - b. Perbaikan Proses Pemilu: Penelitian ini dapat membantu Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan upaya mereka dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu.
 - c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian selama pemilu, yang dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan.
 - d. Pembelajaran bagi Daerah Lain: Menjadi model dan pembelajaran bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa dalam pemilihan umum.

- e. Kontribusi Terhadap Demokrasi: Meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan damai.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah langkah-langkah konkret yang menjelaskan cara mengukur atau melaksanakan konsep atau variabel yang ada dalam penelitian. Berikut adalah beberapa definisi operasional yang mungkin diperlukan:

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya memiliki arti yaitu sebuah usaha yang memerlukan suatu tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁷ Upaya yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kotabaru.

2. Upaya Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Bawaslu yang berada di Kotabaru dan bertugas untuk megawasi jalanya pelaksanaan Pemilu.⁸

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1250.

⁸Abdullah, dan Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009), hlm. 99.

Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara di bidang politik.⁹ Pemilu dalam penulisan ini adalah pemilihan calon Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang bertempat di Kabupaten Kotabaru.

3. Menanggulangi Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian merujuk pada kata-kata, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan atau sikap prasangka, baik yang dilakukan oleh pelaku ujaran kebencian itu sendiri atau oleh korban dari tindakan tersebut.¹⁰ Dalam konteks penulisan ini, ujaran kebencian merujuk pada penyebaran informasi palsu oleh masyarakat atau anggota partai politik dengan tujuan mencemarkan nama baik lawan politik, terutama dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum.

Tindakan-tindakan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengambil tindakan penegakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan.¹¹

⁹Megenai hubungan antara Pemilu dan Kedaulatan rakyat dapat di lihat dalam Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak.Hukum UI cetakan. V, 1983), hlm. 328-329.

¹⁰Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009), hlm. 38.

¹¹Notoatmdjo & Latipun, *Pendidikan Perilaku Kesehatan, Konsep dan Penerapan*. (Jakarta: EGC, 2005), hlm. 4.

Contoh pengukuran yang dilakukan yakni data tentang kebijakan, program, atau tindakan yang diambil oleh Bawaslu untuk menangani kasus-kasus ujaran kebencian, serta evaluasi efektivitas tindakan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial” yang di tulis oleh Muhammad Ithofiyul Karim mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini membahas strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 melalui media sosial. Pada tahun politik tersebut, media sosial memainkan peran penting, tetapi juga menyaksikan peningkatan ujaran kebencian dan berita palsu. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki peran kunci dalam memberikan edukasi untuk mencegah pelanggaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi dan peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019 melalui media sosial. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan teori pemilu demokratis, teori pengawasan, dan pendekatan institusionalisme dalam analisisnya.¹²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai alat untuk membantu dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Mereka juga berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan media sosial, termasuk publik figur/influencer. Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga membentuk forum diskusi dan sekolah kader serta bekerja sama dengan pihak eksternal. Langkah-langkah ini merupakan upaya aktif dalam menjalankan pengawasan dan mencegah pelanggaran pemilu melalui media sosial.

2. Skripsi yang berjudul “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia” yang di tulis oleh Sandi Irawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Skripsi ini meneliti tentang mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Undang-undang. Perbedaannya dalam penelitian ini objeknya Bawaslu membahas Hukum Kelembagaan Negara khususnya eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu.¹³

¹²Muhammad Ithofiyul Karim mahasiswa dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

¹³Sandi Irawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penanganan ujaran kebencian berdasarkan surat edaran kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015” yang di tulis oleh Sutrisno Adi Gunawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi ini meneliti tentang Surat Edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian yang merujuk kepada Undang-undang yang mana isi dari surat edaran itu menyangkut pemberitahuan resmi yang diedarkan dengan pihak tertentu. Perbedaannya adalah penelitian ini terfokus terhadap penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian dan akibat hukum, sedangkan penulis hanya terfokus pada upaya Bawaslu dalam mengatasi ujaran kebencian dalam pelaksanaan pemilu di Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Kotabaru.¹⁴
4. Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial” yang di susun oleh Meri Febriyani, Mahasiswa dari Fakuktas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung 2018. Persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu dan judul peneliti adalah mengenai objek dan subjek penelitian. Pada skripsi ini sama-sama meneliti ujaran kebencian di media. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan penyebab ujaran kebencian di media sosial dengan pendekatan yuridis menganalisis isi

¹⁴Sutrisno Adi Gunawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

pesan ujaran kebencian pada program acara obras dengan pendekatan deskriptif kualitatif¹⁵

5. Skripsi yang berjudul “Pengaturan Ujaran Kebencian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah” yang di susun oleh Indah Permatasari, Mahasiswa dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara (siyasah), Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi adalah pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, karena saat akan mendekati agenda pesta demokrasi atau disebut juga dengan pemilu, perilaku ujaran kebencian sangat meningkat. Kelompok calon tertentu mungkin akan berselisih dengan kelompok pendukung yang lainnya, sehingga pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, ini sangat rentan berhadapan dengan hak kebebasan pendapat dan berekspresi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengaturan ujaran kebencian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan tinjauan siyasah dusturiyah. Untuk menjawab objek kajian tersebut, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.¹⁶

¹⁵Meri Febriyani, Mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung 2018

¹⁶Indah Permatasari, Mahasiswa dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara (siyasah), Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2023.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan mencakup beberapa elemen penting, termasuk latar belakang pemilihan judul, yang dijelaskan secara rinci melalui rumusan masalah. Selanjutnya, tujuan penelitian dan signifikansinya ditetapkan berdasarkan rumusan masalah tersebut. Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan pada istilah-istilah yang memiliki makna umum atau luas. Kajian pustaka digunakan sebagai bukti atau fakta yang relevan dengan tujuan penelitian. Susunan keseluruhan skripsi dijelaskan dalam sistematika penulisan.

BAB II membahas landasan teori yang relevan dengan objek penelitian. Ini melibatkan teori-teori yang mendukung penelitian, serta tinjauan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pembahasan mencakup pemilu di Indonesia, dengan sub-bab yang menjelaskan pengertian, pelaksanaan, calon peserta pemilu sesuai Peraturan Perundang-undang. Selanjutnya, membahas anggota dan kinerja Bawaslu dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Kotabaru, serta tugas dan kewenangannya. Terakhir, sub-bab membahas ujaran kebencian (*hate speech*) dan bagaimana solusi maupun upaya mengurangi hal tersebut dimasyarakat, termasuk definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pemilu.

BAB III adalah metode penelitian, yang menjelaskan cara peneliti mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian. Ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV berisi laporan hasil penelitian, termasuk gambaran umum tentang Bawaslu berdasarkan informasi dari wawancara informan, hasil wawancara, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V adalah bagian penutup, yang memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, saran-saran yang dianggap perlu berdasarkan hasil penelitian akan disajikan.